

**ANALISIS PERAN AKTOR DALAM
IMPLEMENTASI PROGRAM KELURAHAN RAMAH LINGKUNGAN
DI KECAMATAN BANYUMANIK**

Oleh:

Ghana Abdila Hekmatyar, Kismartini, R Slamet Santoso

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Eco-Friendly Village program is the government's efforts to manage and use space in order to improve health and society wealth to bring the city of Semarang clean, healthy, and green. Banyumanik as one of the programs target is one of the largest garbage contributor, this is because the district of Banyumanik located on the main road that caused the rapid development. This study aims to analyze the role of actors in the implementation of Eco-Friendly Village programme and to know the determinants of the role of actors in the implementation of Eco-Friendly Village programme. This study is a qualitative descriptive study. Data was collected through observation, documentation, and in-depth interviews to informants who played a role in the program. The result of this study is there are some actors involved in this program that are the governments (Environment Agency, Banyumanik District, Srandol Kulon Village), NGO's (PKK, Trash Bank "Resik Apik"), and society. Each actor has an important role that can help to achieve the objective of the program, although there were also actors with less contribution or their role is not maximum because of several factors that determine their role. Based on these results, the researcher suggests that of an improvement in the context of the role of each actor that is involved, as well as improvement in the context of the determinants of the role of actors which are considered still unwell, so that the implementation of Eco-Friendly Village programme can run optimally.

Keywords: role, actors, eco-friendly village

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan Ramah Lingkungan merupakan suatu program untuk mengurangi permasalahan lingkungan dengan mengutamakan aspek sistem pengelolaan sampah terpadu yang lebih mengutamakan partisipasi masyarakat serta dengan cara penerapan pengelolaan sampah secara mandiri di setiap kelurahan, serta pemanfaatan potensi yang ada sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi warga kelurahan tersebut.

Program Kelurahan Ramah Lingkungan di Kecamatan Banyumanik saat ini bisa dikatakan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan belum terpenuhinya semua kriteria-kriteria yang telah ditetapkan seperti ketersediaan lubang biopori, sumur resapan, padahal keberadaan lubang biopori sangat penting untuk mengurangi resiko banjir di Kota Semarang, mengingat Kecamatan Banyumanik terletak di wilayah perbukitan, sehingga air yang tidak mampu diserap oleh tanah akan mengalir turun dan mengakibatkan banjir di wilayah yang lebih rendah. Selain itu masih adanya kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara seperti pembakaran sampah. Padahal seharusnya sampah

Selain itu, keberadaan aktor dalam program Kelurahan Ramah Lingkungan juga masih menjadi kendala, karena program ini sangat bergantung pada partisipasi aktor yang terlibat. Aktor dalam Program Kelurahan Ramah Lingkungan ini adalah:

1. Pemerintah

Pemerintah merupakan aktor dari pemerintah yang bersinggungan

dengan program Kelurahan Ramah Lingkungan. Dalam hal ini instansi yang berkaitan yaitu Badan Lingkungan Hidup selaku pemilik kebijakan tersebut, serta pihak Kecamatan Banyumanik dan kelurahan terpilih yang menjadi objek serta pelaksana Program Kelurahan Ramah Lingkungan. Pemerintah merupakan aktor yang memiliki peran sebagai fasilitator, yaitu untuk memperlancar pencapaian tujuan dengan memberikan bantuan berupa pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana, komunikasi dll. Hal ini dilakukan agar setiap aktor dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. LSM

LSM merupakan kelompok masyarakat yang bergerak didalam bidang lingkungan seperti Bank Sampah, Pengolah Sampah serta kelompok masyarakat lain seperti PKK, karang taruna dll. Dalam hal ini peran LSM sangat dibutuhkan karena mereka dapat menjadi penggerak masyarakat lain untuk melakukan usaha pengelolaan lingkungan.

3. Masyarakat

Masyarakat menjadi aktor kunci dalam program ini, karena masyarakat merupakan orang yang memproduksi sampah dan diharapkan menjadi aktor dalam usaha pengelolaan sampah itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya peran masyarakat kurang terlihat, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program Kelurahan Ramah Lingkungan ini. Maka dari itu perlu diteliti kembali mengenai upaya yang dilakukan oleh setiap aktor agar program ini dapat mencapai semua kalangan termasuk masyarakat.

Dengan adanya beberapa aktor dalam pelaksanaan Program Kelurahan Ramah Lingkungan di Kecamatan Banyumanik, maka akan timbul berbagai hambatan yang akan mempengaruhi peran aktor-aktor yang terlibat dalam program tersebut. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk menganalisis peran masing-masing aktor dalam program Kelurahan Ramah Lingkungan di Kecamatan Banyumanik serta mengetahui faktor penentu keberhasilan peran masing-masing aktor. Menurut penulis, peran aktor yang terlibat dalam program Kelurahan Ramah Lingkungan di kecamatan Banyumanik, terdapat fenomena yang akan berpengaruh dalam pelaksanaan Program Kelurahan Ramah Lingkungan di Kecamatan Banyumanik, seperti :

1. Sumber daya manusia yang lemah
2. Kelembagaan yang lemah
3. Perbedaan persepsi
4. Koordinasi yang lemah
5. Kurangnya pemahaman terhadap program

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis mengambil judul **“ANALISIS PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KELURAHAN RAMAH LINGKUNGAN DI KECAMATAN BANYUMANIK”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran aktor dalam implementasi program Kelurahan Ramah Lingkungan?
2. Apa faktor penentu keberhasilan peran aktor dalam implementasi program Kelurahan Ramah Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran aktor dalam pelaksanaan program Kelurahan Ramah Lingkungan.

2. Mengetahui apa saja faktor penentu keberhasilan peran aktor dalam implementasi program Kelurahan Ramah Lingkungan.

D. Kerangka Teori

D.1 Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari kata policy yang pelaksanaannya mencakup peraturan-peraturan didalamnya dan sangat berkaitan dengan proses politik (Islamy, 2004:13). Sedangkan menurut Charles O. Jones dalam Winarno (2007:16) istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Secara umum, istilah “kebijakan” digunakan untuk menunjuk perilaku aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu (Winarno, 2007:16)

D.2 Model Implementasi

Menurut Edwards (Subarsono, 2005:90) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Dalam pandangan Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. komunikasi

2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi.

D.3 Formulasi Kebijakan Yang Baik

Dilihat dari prosesnya, suatu kebijakan publik seharusnya disusun melalui tahapan-tahapan tertentu (Tabel 1). Berikut tahap menyusun kebijakan yang baik:

D.4 Keefektifan Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya terdapat “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam keefektifan kebijakan (Nugroho, 2011:650), yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan
2. Ketepatan Pelaksanaan
3. Ketepatan Target
4. Ketepatan Lingkungan
5. Ketepatan Proses

Tabel 1. Formulasi Kebijakan Yang Baik Menurut William Dunn

Identifikasi Permasalahan	Mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan.
Menata agenda formulasi kebijakan	Memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan.
Perumusan proposal kebijakan	Mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut.
Legitimasi kebijakan	Memilih satu buah proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum
Implementasi kebijakan	Mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran, dan pengumpulan pajak.
Evaluasi Kebijakan	Melakukan studi program, melaporkan <i>output</i> -nya, mengevaluasi pengaruh (<i>impact</i>) dan kelompok sasaran dan non-sasaran, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan

Sumber: Nugroho (2006:77)

D.5 Langkah Evaluasi Kebijakan

Edward A. Schuman dalam Wirawan (2011:80) mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah

3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

D.6 Aktor Implementasi

Gonsalves dalam Iqbal (2005:90) mendeskripsikan aktor implementasi atas siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Mereka bisa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau lembaga dalam berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat.

Pada umumnya peran aktor dalam implementasi dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Pemerintah,
- 2 Swasta
3. Masyarakat

D.7 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Peran Aktor

Menurut Husnul Yakin (2011:95) mengatakan bahwa ada 4 unsur yang perlu diperhatikan dalam mengetahui faktor penentu keberhasilan peran para aktor dalam implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Partisipasi aktor, yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor-aktor terkait dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
2. Perspektif aktor, yaitu dengan menilai bagaimana aktor-aktor memahami program.
3. Aksesibilitas aktor, yaitu dengan menilai bagaimana akses aktor – aktor dalam pelaksanaan program.

4. Penentuan tindakan, yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor dalam menentukan tindakan.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penulisan kualitatif sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan panduan wawancara (*Interview guide*), observasi serta dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang; Kecamatan Banyumanik; Kelurahan Srandol Kulon. Peran masing-masing aktor diketahui melalui perspektif atau pendapat dari masing-masing aktor dengan mengacu pada indikator yang digunakan oleh peneliti, karena sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai peran masing-masing aktor dalam program Kelurahan Ramah Lingkungan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara serta observasi dan data sekunder yang diperoleh dari catatan, buku, dokumen serta sumber lain.

PEMBAHASAN

A. Peran Aktor dalam Implementasi Program Kelurahan Ramah Lingkungan

A.1 Identifikasi Aktor

Identifikasi Aktor merupakan hal mendasar yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam analisis peran aktor yang terlibat dalam implementasi Program Kelurahan Ramah Lingkungan. Identifikasi aktor akan memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai siapa saja aktor yang terlibat pada pelaksanaan Program Kelurahan Ramah Lingkungan.

Aktor yang terlibat dalam program Kelurahan Ramah Lingkungan adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, kecamatan Banyumanik, Kelurahan Srandol Kulon selaku aktor dari pemerintah. Sedangkan dari LSM adalah kelompok PKK dan Bank Sampah "Resik Apik" sedangkan dari masyarakat ada Ketua RW3 serta warga Kelurahan Srandol Kulon.

A.2 Peran Aktor

A.2.1 Formulasi

Proses formulasi dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang setelah dilakukannya evaluasi dari hasil program yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Proses formulasi dilakukan dengan menyusun strategi dan program, Badan Lingkungan Hidup juga menetapkan kriteria-kriteria yang dibutuhkan kelurahan agar dapat disebut sebagai Kelurahan Ramah Lingkungan.

Proses formulasi program Kelurahan Ramah Lingkungan dimulai dari tahap identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan merupakan tahap dimana aktor pembuat kebijakan menguraikan tuntutan atau masalah agar segera dapat diambil tindakan. Dalam konteks ini Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang melihat sampah merupakan masalah yang mendesak dan harus segera diatasi, pada tahun 2013 saja tercatat produksi sampah Kota Semarang mencapai 1.207,45 m³ setiap harinya, ditambah lagi dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Semarang setiap tahunnya menyebabkan produksi sampah akan terus bertambah, hal ini akan mengakibatkan meningkatnya volume sampah di TPA, selain itu sampah juga dapat memberi berbagai dampak buruk seperti banjir, pemanasan global, dan rusaknya lingkungan sekitar sehingga

dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang tinggal didalamnya.

Menata agenda formulasi kebijakan merupakan tahap dimana isu yang diangkat dipilih dan dikemukakan, pemilihan isu sampah oleh BLH tersebut didasari oleh tingkat urgencitas yang dianggap telah mendesak.

Perumusan proposal kebijakan merupakan tahap dimana mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani suatu masalah. Dalam konteks ini, Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang menyusun strategi-strategi yang akan dijalankan untuk mengatasi masalah sampah, salah satunya adalah dengan disusunnya kriteria-kriteria KRL, selain itu ada juga study banding yang dilakukan kepada peserta program.

Legitimasi kebijakan merupakan tahap dimana proposal yang telah dipilih agar dijadikan sebuah hukum yang sah dengan adanya persetujuan politik. Dalam konteks ini proposal yang telah jadi diserahkan kepada BAPPEDA untuk memperoleh persetujuan sebagai sebuah hukum yang sah, yang akhirnya dituangkan dalam Peraturan Walikota Semarang tahun 18 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2015.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki peran yang baik dalam proses formulasi kebijakan program Kelurahan Ramah Lingkungan, karena program tersebut disusun sesuai dengan proses formulasi kebijakan yang baik secara teori.

A.2.2 Implementasi

• Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang

memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Hali ini melihat sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan oleh semua aktor dalam mencapai sebuah program.

Berikut peran aktor yang terlibat dalam implementasi Program Kelurahan Ramah Lingkungan di Kecamatan Banyumanik :

1. Badan Lingkungan Hidup berperan dalam proses penyaluran informasi mengenai program tersebut kepada aktor lainnya. Penyaluran informasi tersebut dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang melalui sosialisasi kepada perwakilan Kecamatan, perwakilan Kelurahan, serta perwakilan dari kelompok PKK dari setiap Kelurahan yang ditunjuk sebagai Kelurahan Ramah Lingkungan. Sosialisasi tersebut dilakukan agar tercipta komunikasi serta koordinasi yang baik antar aktor terkait sehingga tercipta kesamaan persepsi antara masing-masing aktor.
Selain itu pada pelaksanaannya Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang juga mengadakan study banding ke salah satu Bank Sampah di Magelang yang dihadiri oleh perwakilan Kelurahan dan PKK. Tujuan diadakannya study banding tersebut adalah agar semua aktor yang ikut memiliki wawasan yang luas mengenai pengolahan sampah serta mereka memiliki gambaran yang lebih nyata mengenai Program Kelurahan Ramah Lingkungan.
2. Pihak Kecamatan Banyumanik dalam program ini berperan dalam penunjukan kelurahan yang akan diajukan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota

Semarang sebagai kelurahan yang ramah lingkungan. Selain itu pihak kecamatan juga berperan dalam penyaluran informasi kepada pihak Kelurahan Srandol Kulon.

3. Pihak Kelurahan Srandol Kulon dalam program ini berperan dalam mengkoordinasi pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam program ini, dan pihak yang dilibatkan adalah PKK, Ketua RW, serta Bank Sampah “Resik Apik”. Selain itu pihak kelurahan juga turut ikut menjalankan program ini karena memang pada kriteria Kelurahan Ramah Lingkungan tersebut terdapat kriteria tersedianya sanitasi lingkungan yang sehat di kantor kelurahan. Selain itu pihak Kelurahan Srandol Kulon juga memberi bantuan berupa sebuah grobak sampah kepada Bank Sampah “Resik Apik”.
4. Ketua RW 3 disini hanya berperan sebagai penyalur informasi kepada PKK dan Bank Sampah.
5. PKK berperan dalam usaha pengolahan sampah plastik menjadi barang-barang yang memiliki nilai jual seperti kerajinan tangan berupa tas dan dompet. Selain itu PKK juga berperan aktif dalam usaha untuk mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam Program Kelurahan Ramah Lingkungan.
6. Bank Sampah “Resik Apik” memiliki peran sebagai wadah untuk tempat penampungan dan pengolahan sampah-sampah yang dikumpulkan dari masyarakat. Namun di Bank Sampah “Resik Apik” lebih difokuskan untuk mengolah

sampah organik menjadi pupuk. Masyarakat berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan serta ikut mendukung berjalannya program tersebut dengan cara ikut memilah sampah organik dan anorganik yang selanjutnya akan diproses oleh PKK maupun Bank Sampah.

- **Ketepatan Proses**

Suatu program dikatakan berhasil apabila para aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan atau program baik itu pemerintah maupun masyarakat memahami bahwa program tersebut penting untuk dilaksanakan. Kesiapan para aktor yang terlibat dalam suatu implementasi kebijakan sangat berpengaruh akan berhasil atau tidaknya upaya-upaya dalam kebijakan tersebut.

Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan program tersebut. Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melakukan sosialisasi serta pelatihan kepada perwakilan dari Kecamatan, Kelurahan, PKK dan LSM agar mereka paham dan mampu untuk melakukan usaha maupun tindakan yang sejalan dengan tujuan program Kelurahan Ramah Lingkungan, namun upaya pencapaian tujuan tersebut tidak didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal ini pemerintah seharusnya menjalankan perannya sebagai fasilitator, agar masyarakat yang menjalankan program ini memiliki kemudahan.

A.2.3 Monitoring dan Evaluasi

Peran Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melakukan evaluasi antara lain:

Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, langkah awal yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melakukan evaluasi adalah dengan melihat dulu apa tujuan dari program Kelurahan Ramah Lingkungan, karena dalam tahap evaluasi merupakan tahap dimana program yang telah berjalan dinilai apakah telah mencapai tujuan yang diharapkan dan direncanakan sebelumnya.

Analisis terhadap masalah, merupakan tahap dimana aktor yang melakukan evaluasi menganalisis masalah yang terjadi di lapangan selama berjalannya suatu kebijakan atau program. Dalam konteks ini, Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang menganalisis masalah yang terjadi selama berjalannya program Kelurahan Ramah Lingkungan antara lain kurangnya koordinasi yang baik antar aktor baik itu dari pemerintah maupun masyarakat yang mengakibatkan tidak meratanya penyaluran informasi hingga ke masyarakat yang berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Kelurahan Ramah Lingkungan, selain itu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di setiap kelurahan.

Deskripsi dan standarisasi kegiatan merupakan tahap dimana evaluator melakukan penjabaran mengenai jalannya suatu kebijakan apakah telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam konteks ini Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak memberikan standar khusus mengenai bagaimana pelaksanaan program Kelurahan Ramah Lingkungan atau bagaimana cara implementor untuk melakukan

usaha pengolahan sampah, karena saat ini terdapat berbagai metode dan inovasi baru untuk mengolah sampah. Namun dalam pelaksanaannya BLH Kota Semarang memberikan kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi untuk menjadi kelurahan yang ramah lingkungan.

Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, merupakan tahap dimana evaluator melakukan pengukuran terhadap adanya perubahan yang terjadi kepada objek suatu kebijakan. Dalam konteks ini BLH Kota Semarang melakukan monitoring pada periode tertentu kepada setiap kecamatan yang terlibat untuk menilai apakah sudah ada perubahan dari sebelum hingga setelah adanya program Kelurahan Ramah Lingkungan. Pengukuran dilakukan dengan mengacu pada kriteria program, salah satunya yaitu ketersediaan tempat pilah sampah, adanya Bank Sampah, serta agen pengolah sampah.

Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain, merupakan tahap dimana evaluator melakukan pengamatan mengenai perubahan yang terjadi dan menentukan apakah perubahan tersebut merupakan perubahan yang terjadi karena adanya suatu kebijakan atau program. Dalam konteks ini BLH Kota Semarang melihat perubahan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sehingga perubahan dapat dilihat jelas melalui terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan.

Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak, merupakan tahap dimana evaluator menyusun indikator dan menilai dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan, baik itu dampak langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini dampak program

Kelurahan Ramah Lingkungan diukur melalui perubahan pendapatan masyarakat yang melakukan usaha pengolahan sampah, selain itu juga tingkat kesehatan masyarakat.

B. Faktor Penentu Keberhasilan Peran Aktor dalam Implementasi Program Kelurahan Ramah Lingkungan

B.1 Perspektif Aktor

Setiap aktor memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai Program Kelurahan Ramah Lingkungan. Terdapat beberapa aktor yang sudah tahu kriteria dan tujuan dari program ini, namun ada juga beberapa yang belum tahu mengenai adanya Program Kelurahan Ramah Lingkungan.

Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan lemahnya komunikasi antar aktor terkait baik itu dari pemerintah maupun masyarakat. Meski Badan Lingkungan Hidup sudah melakukan sosialisasi pada awal periode kepada Pihak Kecamatan Kelurahan dan PKK, namun belum ada usaha yang serius untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa sosialisasi yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dilakukian pada awal periode saja, itupun hanya beberapa aktor saja yang terlibat terutama dari aktor pemerintahan. Sedangkan dari kelompok masyarakat hanya PKK yang aktif mengajak anggota PKK lain untuk ikut berpartisipasi dalam Program Kelurahan Ramah Lingkungan.

B.2 Aksesibilitas Aktor

Dalam pelaksanaan program ini peneliti melihat bahwa aktor yang

memiliki derajat akses yang tinggi dimiliki oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, Kelurahan Srandol Kulon, PKK, serta Bank Sampah “Resik Apik”, hal ini dikarenakan aktor-aktor tersebut merupakan aktor yang memiliki kepentingan dalam bidang lingkungan. Sedangkan masyarakat cenderung tidak tahu akan adanya program Kelurahan Ramah Lingkungan ini, karena tidak adanya aktor yang memberi informasi secara langsung kepada mereka. Padahal dalam program ini partisipasi masyarakat merupakan suatu kewajiban untuk kelancaran program, bahkan dijadikan suatu kriteria agar suatu kelurahan dapat disebut sebagai Kelurahan Ramah Lingkungan. Hal tersebut terjadi belum adanya akses secara jejaring yang baik antar aktor terkait.

B.3 Penentuan Tindakan

Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang telah memberikan pelatihan kepada pihak kelurahan serta PKK untuk mengolah sampah, hal ini dilakukan oleh BLH untuk menciptakan sumberdaya manusia yang terlatih dalam mengolah sampah, jadi BLH tidak semata-mata mengadakan sebuah program tanpa adanya pelatihan terlebih dahulu. Selain itu ketersediaan sumberdaya juga mempengaruhi para aktor dalam menentukan tindakan, karena bagaimana aktor akan bertindak jika mereka tidak memiliki sumberdaya baik itu berupa alat maupun modal. Maka dari itu pihak Kelurahan Srandol Kulon memberikan bantuan berupa sebuah gerobak sampah kepada Bank Sampah “Resik Apik” sehingga dapat digunakan oleh warga untuk mengangkut sampah.

Namun dalam pelaksanaannya pihak Bank Sampah “Resik Apik”

terkendala dengan ketersediaan peralatan, terlihat hanya ada 2 buah tong untuk komposting serta sebuah gerobak sampah. Tong tersebut digunakan untuk pembuatan pupuk dari sampah organik, tong tersebut diperoleh atas inisiatif bank sampah dengan mengumpulkan dana secara swadaya masyarakat, sedangkan gerobak tersebut merupakan pemberian dari pihak Kelurahan Srandol Kulon.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

A.1 Peran Aktor dalam Implementasi Program Kelurahan Ramah Lingkungan

Peran Pemerintah dalam dalam program Kelurahan Ramah Lingkungan dimulai dari tahap formulasi. Peran pemerintah dalam proses formulasi dapat dikatakan sudah baik karena telah disusun sesuai dengan kriteria formulasi kebijakan yang baik secara teori. Namun keadaan dilapangan menuntut adanya pemenuhan sarana dan prasarana dari pemerintah yang seharusnya bisa direncanakan oleh pemerintah terlebih dahulu.

Dalam tahap implementasi ketiga aktor baik itu pemerintah, LSM, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing. Dalam tahap ini pemerintah lebih berperan dalam sosialisasi serta pelatihan kepada aktor terkait, agar aktor tersebut lebih siap serta memiliki keterampilan dalam melakukan pengolahan sampah serta pengelolaan lingkungan. Sedangkan LSM berperan dalam upaya pengelolaan lingkungan dan pengolahan sampah, PKK selama ini aktif melakukan usaha

pengolahan sampah serta memberdayakan anggotanya untuk berketerampilan mengolah sampah didukung dengan adanya Bank Sampah “Resik Apik” yang menampung sampah-sampah dari warga. Sedangkan masyarakat dalam pelaksanaannya dinilai masih pasif dalam program ini. Meski ada beberapa yang ikut mengolah sampah. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat tahu adanya program Kelurahan Ramah Lingkungan ini.

Di tahap Evaluasi aktor yang terlibat adalah dari Pemerintah yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Peran BLH Kota Semarang di tahap evaluasi dinilai sudah baik karena sudah sesuai secara teori dengan langkah evaluasi kebijakan. Namun ditemukan bahwa belum ada indikator untuk mengukur dampak yang ditimbulkan.

A.2 Faktor Penentu Keberhasilan Peran Aktor dalam Implementasi Program Kelurahan Ramah Lingkungan

- a. Dalam hal perspektif aktor, usaha untuk penyatuan perspektif aktor dirasa masih kurang dan belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih butanya masyarakat mengenai masalah lingkungan yang mereka hadapi serta masih rendahnya pemahaman mengenai Program Kelurahan Ramah Lingkungan.
- b. Dalam hal aksesibilitas aktor, tidak semua aktor memiliki derajat akses yang sama terhadap program ini. Hal tersebut dikarenakan tidak terstrukturnya aktor-aktor yang terlibat secara jejaring dari tingkat atas hingga tingkat bawah.

- c. Dalam hal penentuan tindakan, dipengaruhi oleh disposisi para aktor dan sumberdaya yang dimiliki. Sikap dan ketanggapan aktor terhadap permasalahan lingkungan sangat mempengaruhi dalam bertindak. Selain itu ketersediaan sumberdaya juga menentukan para aktor untuk bertindak, karena bagaimana para aktor akan bertindak jika mereka tidak memiliki suatu sumberdaya. Sedangkan di Kelurahan Srandol Kulon ketersediaan sumberdaya untuk mengolah sampah masih kurang.

B. SARAN

B.1 Peran Aktor Program Kelurahan Ramah Lingkungan

1. BLH sebagai aktor dari pemerintah seharusnya menjalankan perannya sebagai fasilitator, yaitu dengan menyediakan sarana yang diperlukan seperti alat komposter, tempat pilah sampah, dll.
2. Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan promosi melalui media massa.
3. Seharusnya Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki indikator khusus untuk mengukur dampak yang ditimbulkan oleh program Kelurahan Ramah Lingkungan, berupa perubahan pendapatan, tingkat kesehatan dll.
4. Pihak Kecamatan Banyumanik seharusnya bisa memberikan masukan kepada pihak Kelurahan maupun PKK berupa ide, inovasi maupun peralatan.

5. Seharusnya pihak Kelurahan juga turut memberikan pengawasan terhadap jalannya program di kelurahan tersebut.
6. Ketua RW 3 seharusnya lebih aktif dalam berkomunikasi kepada masyarakat atau dengan perwakilan Ketua RT. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas program Kelurahan Ramah Lingkungan.
7. Masyarakat seharusnya bisa lebih aktif untuk turut menjalankan program Kelurahan Ramah Lingkungan. Dengan melakukan pemilahan sampah, menjaga kebersihan, dan kerja bakti.

B.2 Faktor Penentu Keberhasilan Peran Aktor

1. Harus ada penyamaan persepsi kepada setiap aktor yang terlibat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada setiap aktor yang terlibat secara berkala, serta promosi melalui pamflet dan poster.
2. Perlu adanya struktur birokrasi yang dapat mengatur hubungan antar aktor secara jejaring, yaitu dengan cara membuat susunan aktor secara bertingkat dari pemerintah hingga masyarakat dengan memberikan hak dan kewajiban yang jelas.
3. Mengingat dalam penentuan tindakan seorang aktor dipengaruhi oleh disposisi dan sumberdaya. Perlu adanya kejelasan hukum yang mengatur tentang program Kelurahan Ramah Lingkungan. Dalam hal sumberdaya, dirasa perlu adanya keterlibatan pihak swasta, mengingat sumberdaya yang dimiliki sangat terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anies. 2006. *Manajemen Berbasis Lingkungan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Artiningsih, Ni Komang Ayu. 2008. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sampangan Dan Jomblang, Kota Semarang)*. Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Sarja Univesitas Diponegoro, Semarang.
- Dunn, William. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Iqbal, Muhammad. 2007. "Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian". *Jurnal Litbang Pertanian*. 26(3).
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi*

- Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Samodra, Wibawa. 1994. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wakka, Abdul Kadir. 2014. Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. Vol. 3 No.1, April 2014 : 47 – 55.
- Wibawa, Samodra, DKK 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: Medi Pressindo.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Yakin, Husnul. 2013. “Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Kemijen, Kota Semarang”. *Journal of Public Policy and Management Review*. 2(2). 91-100.